

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PRAKATA	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
INTISARI	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Keaslian Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Politik Hukum.....	19
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Politik Hukum	19
2. Arah Pembangunan Politik Hukum	22
B. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Peradilan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	30

1. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Penguatan Demokrasi	30
2. Alternatif Peradilan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	34
C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	39
1. Penegakan Hukum Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	39
2. Keadilan Pemilu	44

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	49
B. Sifat Penelitian	50
C. Sumber dan Jenis Data	51
D. Lokasi Penelitian.....	56
E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	56
F. Analisis Data	57
G. Tahapan Penelitian	58

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Aturan Hukum Desain Kelembagaan dan Kewenangan Bawaslu Provinsi Dalam Melakukan Penegakan Hukum Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	62
1. Aturan Hukum Kelembagaan Bawaslu Provinsi Dalam Penegakan Hukum Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	62

2. Aturan Hukum Kewenangan Bawaslu Provinsi Dalam Penegakan Hukum Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	74
3. Problem Kelembagaan dan Kewenangan Bawaslu Provinsi Dalam Penegakan Hukum Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	91
B. Analisis Urgensi Transformasi Kewenangan dan Kelembagaan Bawaslu Provinsi Sebagai Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Lembaga Peradilan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	113
1. Aturan Hukum Lembaga Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	113
2. Problematika Lembaga Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	120
3. Urgensi Pembentukan Lembaga Peradilan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	162
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	189
B. Saran.....	193
DAFTAR PUSTAKA	195